

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan internasional mengalami transformasi dalam dua dekade terakhir yang sejalan dengan meningkatnya dispersi kegiatan produksi secara global, perkembangan global *value chains*, serta penguatan integrasi ekonomi regional. Globalisasi dalam ekonomi telah mendorong semakin terbukanya arus barang, jasa, dan faktor produksi lintas negara sehingga memperkuat keterkaitan ekonomi antarnegara dan mengubah pola perdagangan dari yang bersifat nasional menjadi semakin terintegrasi secara global. Negara tidak lagi berperan sebagai unit produksi yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan produksi internasional yang saling bergantung. Faktor eksternal seperti globalisasi dan peran blok ekonomi dalam membentuk pola perdagangan Indonesia tercermin dari semakin dominannya kerja sama regional sebagai sarana untuk meningkatkan akses pasar dan efisiensi perdagangan (Suryanto & Kurniati, 2022).

Perdagangan internasional dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan manfaat yang diperoleh dari keterlibatan dalam perdagangan lintas negara. Namun, pola perdagangan yang diterapkan setiap negara berbeda-beda. Perbedaan karakteristik ekonomi dan struktural, seperti variasi jumlah penduduk, skala perekonomian, tingkat pembangunan, serta kondisi geografis, memengaruhi kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan peluang perdagangan internasional secara optimal. Tingginya heterogenitas antarnegara tersebut dapat menyebabkan perbedaan kinerja perdagangan dan membatasi

keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional (Pertiwi *et al*, 2020).

Salah satu tantangan besar dalam perdagangan global adalah adanya hambatan berupa tarif dan hambatan non-tarif. Hambatan ini dapat mengurangi efisiensi dalam pengiriman sebuah komoditas tertentu dari satu negara ke negara lainnya. Kebijakan tarif tinggi seringkali digunakan sebagai instrumen proteksi industri domestik, namun di sisi lain dapat menurunkan daya saing ekspor dan membatasi keterlibatan negara dalam rantai nilai global. Kebijakan perdagangan internasional secara tidak langsung ditujukan untuk merespons perubahan dalam lingkungan perdagangan dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif serta memperkuat kerja sama ekonomi antar negara. Namun, perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa kebijakan penetapan tarif yang terlalu agresif juga dapat menjadi permasalahan pada perdagangan, seperti persaingan yang sengit serta dampak yang timbul pada sektor-sektor dalam negara (Prahaski & Ibrahim, 2023).

Perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) berfungsi meminimalkan hambatan perdagangan terutama tarif untuk memperluas akses pasar antarnegara. Melalui FTA, negara-negara anggota dapat menurunkan atau menghapus tarif secara bertahap, meningkatkan efisiensi perdagangan, dan mempercepat integrasi ekonomi kawasan. FTA diharapkan mampu menurunkan biaya perdagangan dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dengan memperlancar arus perdagangan lintas negara (Nurkhamid & Kusumawati, 2025). Dalam periode menengah dan panjang, liberalisasi perdagangan yang dihasilkan oleh FTA tidak hanya berpengaruh pada peningkatan jumlah perdagangan, tetapi juga memengaruhi pola serta arah perdagangan antarnegara. Integrasi perdagangan

melalui FTA mendorong diversifikasi tujuan ekspor dengan mempererat kerja sama ekonomi antarnegara anggota, sehingga ketergantungan pada pasar tradisional dapat dikurangi (Siswanto *et al.*, 2023).

Perkembangan pilihan kebijakan perdagangan serta semakin kuatnya integrasi ekonomi global berimplikasi langsung terhadap perubahan arus perdagangan Indonesia. Menurut teori yang dikemukakan oleh Jacob Viner (1950), pembentukan perjanjian perdagangan bebas seperti FTA dapat menimbulkan dua dampak utama terhadap arus perdagangan, yaitu *trade creation* dan *trade diversion*. *trade creation* terbentuk saat barang-barang yang sebelumnya diproduksi secara domestik dialihkan menjadi impor dari negaranegara anggota dalam perjanjian perdagangan yang memiliki biaya produksi lebih efisien. Perubahan ini meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam kesepakatan perdagangan. Sebaliknya, *trade diversion* terjadi saat impor dari negara-negara non-anggota dalam perjanjian perdagangan yang seharusnya lebih efisien, dialihkan oleh impor dari negara-negara anggota dengan biaya produksi lebih tinggi akibat kebijakan tarif yang lebih menguntungkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penurunan kesejahteraan ekonomi karena arah perdagangan ditentukan oleh adanya perlakuan kebijakan yang berbeda antarnegara, bukan oleh efisiensi biaya relatif. Arus perdagangan dapat terdistorsi dengan berpindah dari produsen yang relatif lebih efisien kepada produsen yang kurang efisien, yang semata-mata dipicu oleh kebijakan preferensi perdagangan yang bersifat diskriminatif terhadap negara-negara di luar kawasan integrasi (Salvatore, 2013).

Penerapan FTA di kawasan asia, khususnya Indonesia membawa dampak ganda. Di satu sisi, perdagangan antarnegara anggota meningkat karena tarif yang lebih rendah (*trade creation*), namun di sisi lain, impor dari negara non-anggota menurun akibat adanya peralihan ke sesama anggota FTA (*trade diversion*) (Shyafira, 2024). Keberhasilan suatu FTA tidak sekedar ditentukan oleh penghapusan tarif, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas negara dalam mempertahankan daya saing produk domestik agar tetap kompetitif terhadap produk yang berasal dari mitra dagang. Integrasi ekonomi regional dan global dapat memengaruhi struktur perdagangan sekaligus kinerja perekonomian suatu negara secara keseluruhan (Salvatore, 2013). Indonesia sebagai salah satu peranan ekonomi terbesar di Asia Tenggara menunjukkan tingkat ketergantungan yang relatif tinggi pada sektor ekspor sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Struktur ekspor Indonesia menunjukkan orientasi yang kuat ke kawasan Asia, khususnya negara-negara ASEAN serta mitra dagang utama di Asia Timur dan Pasifik. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan regional memiliki potensi untuk berperan penting dalam membentuk struktur dan kinerja ekspor Indonesia.

Salah satu kesepakatan perdagangan yang berpotensi mempengaruhi pola *trade creation* dan *trade diversion* adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perjanjian perdagangan sebelumnya seperti ASEAN+1 *Free Trade Agreements* (FTA) yang melibatkan ASEAN dengan masing-masing mitra seperti China, Korea Selatan, dan Jepang. Perjanjian ASEAN+1 umumnya bersifat bilateral atau parsial dengan aturan asal barang (*rules of origin*), standar perdagangan, serta mekanisme

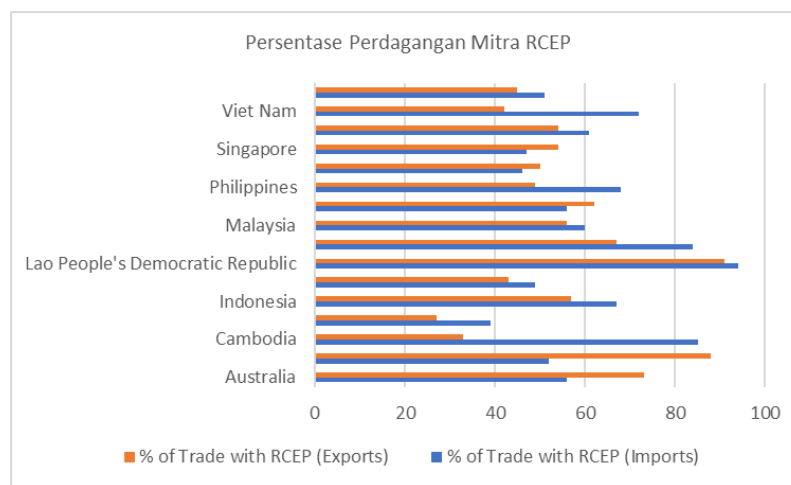
tarif yang berbeda-beda antarperjanjian. Kondisi ini sering menimbulkan kompleksitas dalam praktik perdagangan yang dikenal sebagai *spaghetti bowl effect* (saling tumpang tindih) sehingga menciptakan aturan yang kompleks dan tidak seragam antarnegara. Sebaliknya, RCEP mengintegrasikan berbagai perjanjian tersebut ke dalam satu kerangka yang lebih komprehensif dengan harmonisasi aturan, termasuk penyederhanaan rules of origin, liberalisasi tarif yang lebih luas, serta peningkatan fasilitasi perdagangan antarnegara anggota.

RCEP adalah salah satu perjanjian perdagangan regional terbesar di dunia yang mencakup sepuluh negara anggotanya dari ASEAN dan lima mitra dagang utama, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. RCEP tidak hanya memperluas cakupan liberalisasi perdagangan yang telah ada melalui berbagai perjanjian sebelumnya, tetapi juga mengintegrasikan aturan perdagangan ke dalam satu kerangka yang lebih harmonis dan komprehensif. Implementasi RCEP dimulai sejak awal tahun 2022 diperkirakan membawa implikasi penting terhadap pola perdagangan negara anggota, khususnya melalui penurunan hambatan perdagangan dan peningkatan akses pasar intra-kawasan. Bagi Indonesia, RCEP berpotensi memperkuat posisi ekspor di kawasan Asia-Pasifik sekaligus mengubah orientasi perdagangan terhadap mitra non-anggota.

Penurunan tarif dalam kerangka RCEP dipandang sebagai instrumen strategis yang berpotensi merekonstruksi pola perdagangan intra-kawasan Asia-Pasifik. Perjanjian ini menargetkan eliminasi sekitar 90% tarif antarnegara anggota, sehingga biaya transaksi perdagangan menurun dan arus ekspor regional terdorong meningkat. Bukti empiris mengindikasikan bahwa konsesi tarif RCEP berpotensi mendorong kenaikan ekspor intra-kawasan mendekati 2% atau sekitar US\$42

miliar, yang merefleksikan kuatnya efek *trade creation* dari integrasi tarif tersebut (Wei, 2024). Meskipun demikian, preferensi tarif yang lebih rendah juga berisiko menimbulkan *trade diversion*, yakni pergeseran yang berawal dari impor dari negara non-anggota yang lebih terjangkau dalam biaya menuju pada negara anggota RCEP yang tidak efisien hanya karena keuntungan tarif relatif dalam kesepakatan perdagangan.

Gambar 1.1 Persentase Perdagangan Negara Anggota Mitra RCEP

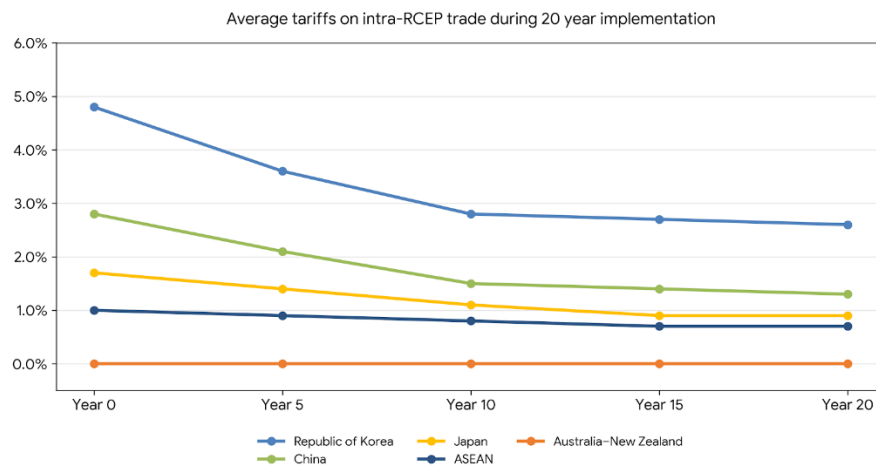


Sumber: UN Comtrade, 2025 (diolah)

Sekitar 51% impor dan 45% ekspor negara anggota berlangsung dengan sesama mitra RCEP, yang mengindikasikan tingginya intensitas perdagangan intra-kawasan. Sejumlah negara menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat besar terhadap pasar regional, seperti Laos yang lebih dari 90% aktivitas ekspor dan impornya terjadi di dalam kawasan. Kondisi serupa juga terjadi pada Kamboja dan Myanmar yang juga memiliki pangsa perdagangan intra-RCEP yang dominan. Sebaliknya, perekonomian besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea memperlihatkan proporsi perdagangan intra-kawasan yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara kecil, meskipun dari sisi nilai absolut volumenya tetap

besar. Adapun Indonesia mencatat sekitar dua pertiga impor dan lebih dari setengah eksportnya ditujukan ke sesama anggota RCEP, yang menegaskan pentingnya kawasan ini sebagai pasar utama dalam struktur perdagangan nasional.

Gambar 1.2 Rata-rata Tarif Perdagangan Intra-RCEP



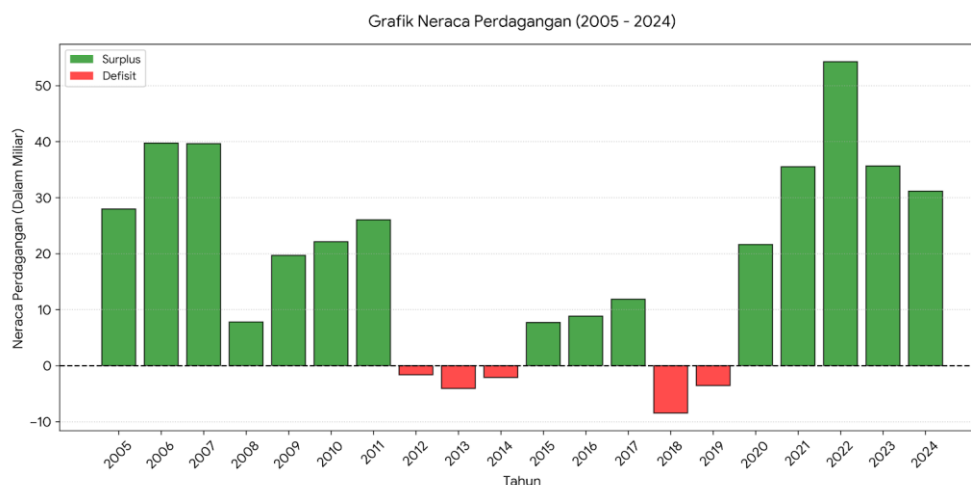
Sumber: UN Comtrade, 2025 (diolah)

Nilai rata-rata tarif perdagangan intra-RCEP pada gambar tersebut disusun berdasarkan komitmen penurunan tarif yang tercantum dalam *Annex I Schedules of Tariff Commitments* pada perjanjian RCEP, yang mencakup ribuan pos tarif lintas negara dan sektor. Pengukuran dilakukan menggunakan tarif rata-rata tertimbang perdagangan (*trade-weighted tariffs*) untuk menggambarkan proyeksi penurunan tarif sepanjang periode implementasi selama 20 tahun. Walaupun proporsi lini tarif yang mengalami liberalisasi relatif terbatas, yaitu sekitar 6% dari total pos tarif. Hal ini dikarenakan sebagian besar perdagangan intra-RCEP telah bebas bea. Tingkat pendalaman liberalisasi pada lini tersebut cukup besar dengan rata-rata penurunan sekitar 9 poin persentase.

Dalam kerangka RCEP, lebih dari 90% barang yang diperdagangkan ditargetkan menjadi bebas tarif melalui kombinasi eliminasi langsung dan

pengurangan secara bertahap dengan pengecualian pada sektor yang dikategorikan sensitif dan strategis. Perbedaan besaran konsesi antarnegara juga tercermin pada pola grafik, di mana Australia dan Selandia Baru menunjukkan perubahan yang sangat terbatas karena sekitar 98,6% tarifnya telah nol sejak awal, sedangkan Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea mengalami penurunan yang lebih menonjol seiring tingkat tarif awal yang lebih tinggi dan cakupan liberalisasi yang lebih luas.

Pengurangan tarif melalui kesepakatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) membuka lebih besar kesempatan Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara yang tergabung. Sejak RCEP mulai diterapkan, perkembangan volume perdagangan Indonesia menunjukkan perubahan yang cukup berarti yang dapat dilihat dari dinamika neraca perdagangan. Perkembangan neraca perdagangan Indonesia selama dua dekade terakhir memperlihatkan dinamika yang cukup bergejolak. Pola tersebut menunjukkan bahwa kinerja perdagangan Indonesia tidak bersifat stabil, melainkan responsif terhadap perubahan struktur perdagangan dunia, fluktuasi harga komoditas, serta pergeseran pola permintaan internasional.

Gambar 1.3 Perkembangan Neraca Perdagangan Tahun 2005–2024

Sumber: UN Comtrade, 2025 (diolah)

Neraca perdagangan Indonesia pada periode 2005–2024 memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada pertengahan dekade 2000-an, Indonesia berada dalam posisi surplus perdagangan yang relatif kuat, yang mencerminkan tingginya permintaan global terhadap komoditas ekspor utama. Namun, menjelang akhir dekade tersebut terjadi pelemahan yang cukup tajam, sejalan dengan tekanan pada sistem perdagangan global yang turut memengaruhi kinerja ekspor. Pada rentang 2012–2014, Indonesia memasuki fase defisit neraca perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan impor melampaui pertumbuhan ekspor. Perubahan yang cukup menonjol terlihat sejak tahun 2020, ketika neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus yang relatif besar dan mencapai titik tertinggi pada awal dekade 2020-an. Namun, pada periode 2023-2024 sejak indonesia aktif dalam RCEP menunjukan tren penurunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan integrasi perdagangan regional tidak hanya membuka peluang ekspor, tetapi juga diikuti oleh meningkatnya arus impor sehingga memengaruhi keseimbangan neraca perdagangan Indonesia dalam jangka

pendek. Dengan demikian, bahwa kinerja perdagangan Indonesia tetap rentan terhadap dinamika eksternal.

Fluktuasi neraca perdagangan tersebut menjadi relevan karena menggambarkan bahwa posisi perdagangan Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan perdagangan internasional. Seiring dengan meningkatnya integrasi Indonesia dalam kerja sama perdagangan regional, termasuk melalui RCEP, perubahan komposisi mitra dagang berpotensi memengaruhi kinerja perdagangan melalui mekanisme *trade creation* maupun *trade diversion*. Oleh karena itu, analisis terhadap pola ekspor multilateral Indonesia menjadi penting untuk menilai apakah integrasi melalui RCEP lebih banyak menciptakan perdagangan baru yang mendorong peningkatan ekspor, atau justru mengalihkan arus perdagangan dari negara non-anggota.

Gambar 1. 4 Perkembangan Ekspor Indonesia ke Kelompok Mitra Dagang RCEP Tahun 2005–2024



Sumber: UN Comtrade, 2025 (diolah)

Berdasarkan visualisasi rata-rata ekspor Indonesia ke negara-negara mitra RCEP selama periode 2005–2024, dapat diamati bahwa kinerja ekspor Indonesia

mengalami dinamika yang tidak konstan, ditandai oleh beberapa periode pertumbuhan dan kontraksi yang cukup jelas. Pada fase awal pengamatan, tahun 2005 hingga 2008, rata-rata ekspor menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap, yang mencerminkan penguatan aktivitas perdagangan Indonesia seiring dengan kondisi perekonomian global yang relatif ekspansif sebelum terjadinya krisis keuangan internasional. Fluktuasi ekspor kembali terlihat pada periode 2018–2020, yang juga bertepatan dengan meningkatnya tekanan pada perdagangan internasional. Periode 2023–2024, ketika Indonesia mulai aktif mengimplementasikan komitmen dalam RCEP terlihat rata-rata ekspor tetap berada pada level yang relatif tinggi, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dampak RCEP terhadap ekspor Indonesia pada tahap awal implementasi belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan ekspor yang bersifat akseleratif, melainkan masih berada pada fase penyesuaian struktur perdagangan. Kondisi tersebut dapat mengarah pada indikasi terjadinya *trade creation* dan *trade diversion* di dalam kawasan tersebut.

Dampak *trade creation* dan *trade diversion* telah banyak ditemukan dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia. Salah satu contohnya terdapat pada *ASEAN–India Free Trade Agreement* (AIFTA), di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut belum sepenuhnya memberikan keuntungan bagi kinerja ekspor Indonesia. Rachman dan Hartono (2023) menganalisis dengan metode PPML menemukan bukti empiris adanya dampak *trade diversion*, ditandai dengan pergeseran perdagangan Indonesia dari mitra non-anggota ke negara anggota AIFTA, namun tanpa diikuti peningkatan ekspor intra-regional yang optimal. Sementara itu, hasil yang berbeda ditunjukkan

dalam penelitian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Studi yang dilakukan oleh Mahdi, Suharno, dan Nurmalina (2021) dengan metode RSCA (*Revealed Symetric Comparative Advantage*) terhadap perdagangan hortikultura Indonesia menunjukkan bahwa perjanjian tersebut cenderung menghasilkan dampak *trade creation* pada sisi ekspor Indonesia terhadap negara anggota. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas suatu perjanjian perdagangan regional dalam mendorong kinerja ekspor Indonesia sangat bergantung pada karakteristik mitra dagang dan struktur perdagangan yang terlibat.

Beragamnya temuan empiris pada berbagai perjanjian perdagangan tersebut menunjukkan bahwa dampak integrasi ekonomi regional terhadap perdagangan Indonesia tidak bersifat homogen. Berdasarkan celah penelitian tersebut, maka penelitian ini terdapat kebaruan dari penelitian sebelumnya yaitu pertama, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada berbagai perjanjian perdagangan bebas, seperti AKFTA, AIFTA, dan AJCEP, sedangkan kajian mengenai implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mengintegrasikan ASEAN dengan China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru dalam satu kerangka perdagangan regional, masih relatif terbatas. Kedua, penelitian mengenai dampak implementasi RCEP terhadap *trade creation* dan *trade diversion* ekspor Indonesia dengan memanfaatkan data makroekonomi hingga tahun 2024 masih relatif terbatas sehingga dinamika perdagangan pada fase awal implementasi RCEP belum banyak dianalisis. Ketiga, penelitian terdahulu juga menggunakan pendekatan analisis yang beragam sesuai tujuan masing-masing penelitian seperti PPML dan RSCA, sehingga masih terdapat ruang untuk mengkaji dampak implementasi RCEP melalui pendekatan Gravity

Model dengan regresi data panel. Oleh karena itu, dengan berlakunya *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) sebagai salah satu perjanjian perdagangan regional terbesar di dunia menjadi penting untuk mengkaji apakah RCEP mendorong *trade creation* atau justru memunculkan *trade diversion* pada ekspor Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan oleh peneliti dari latar belakang tersebut antara lain yaitu:

1. Apakah *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia berpengaruh terhadap ekspor Indonesia?
2. Apakah *Gross Domestic Product* (GDP) negara tujuan ekspor berpengaruh terhadap ekspor Indonesia?
3. Apakah nilai tukar riil berpengaruh terhadap ekspor Indonesia?
4. Apakah jarak ekonomi berpengaruh terhadap ekspor Indonesia?
5. Apakah terdapat indikasi *trade creation* pada ekspor Indonesia ke negara anggota *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)?
6. Apakah terdapat indikasi *trade diversion* pada ekspor Indonesia dari negara non-*Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti nyata terhadap rumusan permasalahan yang telah dicantumkan oleh peneliti. Maka dari itu, terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia terhadap ekspor Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) negara tujuan terhadap ekspor Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh nilai tukar riil terhadap ekspor Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh jarak ekonomi terhadap ekspor Indonesia.
5. Mengidentifikasi adanya *trade creation* pada ekspor Indonesia ke negara anggota RCEP.
6. Mengidentifikasi adanya *trade diversion* pada ekspor Indonesia dari negara non-RCEP.

1.4. Ruang dan Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini menyoroti pada kinerja perdagangan internasional Indonesia yang dianalisis melalui total ekspor semua jenis komoditas. Penelitian ini menelaah fenomena *trade creation* dan *trade diversion* dalam kerangka *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak, baik terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1. Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan sebagai bagian upaya mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Disamping itu, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengimplementasikan serta mengembangkan pengetahuan dan kemampuan analitis yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya pada kajian ekonomi internasional dan kebijakan perdagangan.

1.5.2. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat menjadi sumber tambahan untuk referensi akademik dan bahan literatur ilmiah bagi civitas akademika di lingkungan universitas, khususnya dalam kajian ekonomi internasional, perdagangan internasional, dan integrasi ekonomi regional.

1.5.3. Bagi Pembaca

Harapan dari penelitian ini untuk memberikan wawasan serta pengetahuan tentang dinamika perdagangan internasional di Indonesia, khususnya mengenai dampak dari perjanjian perdagangan regional terhadap pergeseran pola ekspor. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian lanjutan, pengembangan kajian akademik, serta perumusan analisis kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan integrasi ekonomi regional.